

**KINERJA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM RSUP dr.  
SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN**

**SKRIPSI**



Disusun oleh :

Yauharin Firdaulina

3121 31731

Program Sarjana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Yayasan Keluarga Pahlawan Negara

Yogyakarta

2023

# HALAMAN PENGESAHAN

## TUGAS AKHIR

### KINERJA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**YAUHARIN FIRDAULINA**

**Nomor Induk Mahasiswa: 312131731**

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 16 Juni 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

**Susunan Tim Penguji:**

Pembimbing



Efraim Ferdinan Giri, Dr., M.Si., Ak., CA.

Penguji



Lita Kusumasari, S.E., M.S.A., Ak., CA.

Yogyakarta, 16 Juni 2023  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta  
Ketua



Wishu Prajogo, Dr., M.B.A.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

*ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE OF PUBLIC SERVICE AGENCY RSUP  
dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN*

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM RSUP dr.  
SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN**

## ABSTRACT

*The Covid-19 pandemic outbreak has caused various crises and impacts on all aspects, especially the economic aspect. Likewise with hospitals, there must be changes in performance patterns that result in fluctuations in financial conditions. Hospitals established by the government must be able to meet several requirements to be able to operate a hospital with a Public Service Agency management pattern, including hospitals must be able to improve the quality of service performance, improve the quality of financial performance, and provide real benefits to the whole community. One way to measure the quality of a hospital's financial performance is by analyzing financial reports. This study aims to determine the performance of the hospital before and after the Covid-19 pandemic and to find out whether the hospital is able to maintain BLU status. The object used in this study is the Financial Report of the Public Service Agency of RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro for the 2019-2022 period. The method used in this study is a quantitative method, namely by doing calculations using financial ratios. The results of the financial performance assessment can be concluded that the company's financial performance after being analyzed can be categorized as moderate performance but still able to maintain BLU status in the future and with the Covid-19 pandemic increasing hospital revenue.*

**Keyword:** *Financial Statement Analysis, Ratio Analysis, Public Service Agency, Financial Performance, Covid-19*

## ABSTRAK

Wabah pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai krisis dan dampak ke segala aspek khususnya aspek ekonomi. Begitu pula dengan rumah sakit, pasti terjadi perubahan pola kinerja yang mengakibatkan adanya fluktuasi kondisi keuangan. Rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah harus mampu memenuhi beberapa persyaratan untuk bisa menyelenggarakan rumah sakit dengan pola pengelolaan Badan Layanan Umum antara lain rumah sakit harus mampu untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan, meningkatkan kualitas kinerja keuangan, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat. Salah satu cara untuk mengukur kualitas kinerja keuangan rumah sakit yaitu bisa dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja rumah sakit sebelum dan setelah pandemi Covid-19 serta untuk mengetahui apakah rumah sakit mampu mempertahankan status BLU. Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah Laporan Keuangan Badan Layanan Umum RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro periode tahun 2019-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu dengan dilakukannya perhitungan menggunakan rasio keuangan. Hasil penilaian kinerja keuangan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan setelah dianalisis dapat dikategorikan termasuk kinerja yang sedang namun tetap mampu mempertahankan status BLU pada masa depan dan dengan adanya pandemi Covid-19 ini meningkatkan pendapatan rumah sakit.

**Kata Kunci:** Analisis Laporan Keuangan, Analisis Rasio, Badan Layanan Umum, Kinerja Keuangan, Covid-19.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Pendahuluan

Wabah pandemi Covid-19 mulai muncul di Wuhan pada Desember tahun 2019 dan mulai masuk ke wilayah Indonesia pada bulan Maret 2020. Adanya pandemi ini menyebabkan berbagai krisis dan dampak ke segala aspek sosial, budaya, politik, dan yang paling terasa dampaknya adalah pada aspek ekonomi. Terjadi gejolak ekonomi yang melanda semua negara di seluruh dunia termasuk Indonesia, yang disebabkan karena penetapan kebijakan oleh *World Health Organization* (WHO) tentang pencegahan penularan virus Covid-19 dengan menerapkan kebijakan *lockdown* atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mana mengakibatkan banyak kegiatan perputaran roda ekonomi yang memerlukan kegiatan diluar rumah terhambat karena adanya perubahan pola kinerja. Begitu pula dengan rumah sakit, pasti terjadi perubahan pola kinerja yang mengakibatkan adanya fluktuasi kondisi keuangan.

Rumah sakit merupakan organisasi yang menyediakan pelayanan dibidang kesehatan yang menyediakan pelayanan antara lain rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Berdasarkan lembaga pendirinya, rumah sakit dibagi menjadi tiga jenis yaitu rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. Untuk rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah pusat maupun daerah, harus diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum dan harus memenuhi beberapa persyaratan untuk bisa menyandang status tersebut dan dapat menerima subsidi dana dari APBN pemerintah. Apabila rumah sakit sudah menyandang status Badan Layanan Umum maka rumah sakit tersebut sudah berbentuk badan hukum yang sifatnya nirlaba atau tidak bertujuan pada profit, berbeda dengan rumah sakit yang didirikan oleh lembaga swasta yang tujuan utama pendiriannya adalah untuk mencari keuntungan. Tujuan utama rumah sakit pemerintah harus memberlakukan pengelolaan BLU adalah supaya penyelenggaraan operasional rumah sakit tetap bisa berjalan secara efektif, efisien serta akuntabel dengan tetap memperhatikan kelayakan pelayanan serta dapat memberikan manfaat nyata yang tetap berprinsip sesuai bisnis yang sehat agar tujuan pemerintah dapat tercapai. Dengan ini, maka diharapkan dapat memacu manajemen rumah sakit untuk lebih meningkatkan kinerja rumah sakit sehingga pendapatan meningkat dan rumah sakit juga akan lebih mandiri.

Rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah harus mampu memenuhi beberapa persyaratan untuk bisa menyelenggarakan rumah sakit dengan pola pengelolaan Badan Layanan Umum yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Beberapa persyaratan yang telah ditentukan antara lain rumah sakit harus mampu untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan, meningkatkan kualitas kinerja keuangan, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat. Salah satu cara untuk mengukur kualitas kinerja keuangan rumah sakit yaitu bisa dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan tahunan dengan menggunakan rasio sebagai alat ukurnya yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Laporan keuangan merupakan dokumen yang memaparkan bagaimana kondisi keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan di masa depan. Maka, laporan keuangan perlu disusun secara tepat dan mudah dipahami agar para penggunanya tidak salah paham yang bisa berakibat salah dalam mengambil keputusan yang mungkin akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan atau

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

organisasi. Laporan keuangan sendiri biasanya terdiri atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun, sesuai dengan PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum komponen laporan keuangan BLU berbeda dengan komponen penyusunan laporan keuangan perusahaan atau organisasi swasta, yaitu terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Alat analisis yang paling sering digunakan adalah menggunakan rasio. Untuk menganalisis laporan keuangan pada BLU, menurut peraturan Dirjen perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016, perlu menggunakan rasio khusus yang terdiri atas Rasio (*Cash Ratio*), Rasio Lancar (*Current Ratio*), Periode Penagihan Piutang (*Collecting Periode*), Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turnover*), Imbalan Atas Aset Tetap (*Return on Fixed Asset*), Imbalan Ekuitas (*Return on Equity*), Perputaran Persediaan (*Inventory Turnover*), Rasio PNPB terhadap Biaya Operasional, dan Rasio Subsidi Biaya Pasien.

Rumah Sakit Umum Pusat Soeradji Tirtonegoro Klaten merupakan salah satu rumah sakit yang menyanggah status BLU sejak 2007 lalu. Maka RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro harus bisa memenuhi berbagai persyaratan sebagai BLU. Apalagi dengan adanya fenomena pandemi ini, pasti kinerja keuangan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro akan sangat terpengaruh. Perubahan kinerja keuangan ini yang akan dianalisis melalui laporan keuangan yang telah diaudit menggunakan alat analisis rasio sehingga dapat dilihat apakah RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro mampu memenuhi syarat sebagai BLU untuk kedepannya karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, jika lembaga BLU mengalami kerugian yang bisa dikatakan cukup besar, perusahaan atau organisasi dapat dinyatakan tidak mampu lagi untuk memenuhi syarat substantif, teknis, dan/atau administratif yang mana akan berakibat status BLU dapat dicabut

## **Tinjauan Pustaka**

Menurut Mahsun (2006) (dalam Winda Ayu Tyas, 2019), kinerja merupakan proyeksi mengenai bagaimana tingkat keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan atau aturan guna mencapai suatu keberhasilan pencapaian tujuan, visi dan misi yang dimiliki oleh suatu organisasi yang telah disusun dalam *strategic planning*.

Menurut Dr. Francis Hutabarat (2021) , pengukuran kinerja keuangan merupakan proses pengamatan mengenai sejauh mana perusahaan mampu melaksanakan kebijakan dan perturan pelaksanaan keuangan melalui proses analisis yang mendalam dengan cara meramalkan prospek masa depan perusahaan dengan mengamati dan mengevaluasi bagaimana kinerja perusahaan pada periode sebelumnya untuk bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan demi meningkatkan kinerja keuangan.

Untuk mengukur kinerja perusahaan secara aspek keuangan bisa dilaksanakan dengan cara menganalisis laporan keuangan yang disusun oleh entitas setiap tahunnya, sedangkan untuk menilai kinerja perusahaan secara aspek non-keuangan bisa dilakukan dengan mengevaluasi strategi manajemen perusahaan dalam proses pencapaian tujuannya.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Menurut PSAK Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyajian Laporan Keuangan, Laporan keuangan merupakan proses penyajian mengenai posisi dan kinerja keuangan suatu entitas yang sangat terstruktur. Penyajiannya berisi seluruh pencatatan transaksi keuangan entitas sesuai dengan posisinya, serta menunjukkan bagaimana kinerja keuangannya.

Menurut Fahmi Irham (2015), Analisis rasio keuangan adalah sarana untuk menganalisis prestasi kinerja keuangan entitas dengan memproyeksikan bermacam hubungan maupun indikator keuangan dengan tujuan untuk menggambarkan adanya perubahan posisi keuangan atau prestasi operasional pada masa lampau serta berguna untuk memproyeksikan mengenai tren pola perubahan yang terjadi, yang lalu akan menunjukkan resiko dan peluang yang akan terjadi pada entitas.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum, Organisasi di lingkungan pemerintah yang dikenal sebagai Badan Layanan Umum, juga dikenal sebagai BLU, berfungsi untuk menyediakan layanan kepada masyarakat melalui penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mementingkan keuntungan finansial dan menjalankan operasinya berdasarkan prinsip produktifitas dan efisiensi.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya, Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat.

Sebuah instansi yang apabila mampu memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif, satuan kerja instansi pemerintah maka dapat diizinkan untuk mengelola keuangan dengan PPK-BLU.

Setiap persyaratan memiliki maksud tersendiri. Persyaratan substantif meliputi kemampuan organisasi untuk menyelenggarakan layanan umum yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa layanan umum, pengelolaan layanan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.. Lalu yang dimaksud dengan persyaratan teknis yaitu kinerja pelayanan berfungsi dengan baik dan layak serta kinerja keuangan instansi harus dalam kondisi yang sehat. Selanjutnya, syarat administratif berarti bahwa organisasi harus dapat menyajikan semua dokumennya, seperti pola tata kelola, laporan keuangan pokok, standar pelayanan minimum, pernyataan bahwa organisasi akan meningkatkan kinerja pelayanan secara keuangan dan bermanfaat bagi masyarakat, serta laporan audit terakhir atau pernyataan bahwa organisasi bersedia untuk diaudit secara mandiri.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 6, penerapan PPK-BLU bisa diberhentikan apabila BLU yang bersangkutan sudah tidak mampu memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Selain itu juga status BLU dapat dicabut apabila statusnya diubah menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan berdasarkan penetapan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencabutan status BLU ini dilakukan oleh Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sejak tahun 2007 maka berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016 penilaian kinerja keuangan BLU dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa rasio yaitu antara lain:

## 1. *Cash Ratio* atau Rasio Kas

Untuk menilai kemampuan kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, rasio kas dibuat dengan melakukan perbandingan antara kas dan setara kas dengan kewajiban jangka pendek. Menurut Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016 rumus menghitung rasio kas adalah sebagai berikut :

$$RK = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

## 2. *Current Ratio* atau Rasio Lancar

Rasio lancar adalah ukuran kesanggupan sebuah perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar mereka. Rasio ini dibuat dengan membandingkan aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Menurut Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016 rumus menghitung *current ratio* adalah sebagai berikut :

$$RL = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

## 3. *Collection Period* atau Periode Penagihan Piutang

Rasio periode penagihan piutang berguna untuk menentukan seberapa mampu suatu perusahaan untuk mengumpulkan sejumlah besar piutang dalam jangka waktu tertentu. Menurut Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016 rumus menghitung Periode Penagihan Piutang adalah sebagai berikut :

$$PPP = \frac{\text{Piutang Usaha} \times 360}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 1 \text{ hari}$$

## 4. *Fixed Asset Turnover* atau Perputaran Aset Tetap

Perputaran aset tetap adalah rasio yang menunjukkan seberapa efektif sebuah bisnis menggunakan semua asetnya untuk menghasilkan pendapatan selama periode waktu tertentu. Menurut Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016 rumus menghitung *current ratio* adalah sebagai berikut :

$$PAT = \frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

## 5. *Return on Fixed Asset* atau Imbalan atas Aset Tetap

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

untuk mengevaluasi penggunaan aset tetap dalam operasi yang menghasilkan keuntungan, imbalan atas aset tetap dihitung dengan membandingkan surplus atau defisit sebelum pos keuntungan atau kerugian. Rasio ini tidak termasuk pendapatan investasi dari APBN dan biaya penyusutan, dan nilai perolehan aset tetap tidak termasuk konstruksi dalam pengerjaan. Menurut Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016 rumus menghitung *current ratio* adalah sebagai berikut :

$$\text{ROFA} = \frac{\text{Surplus atau Defisit sebelum pos keuntungan atau kerugian}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

## 6. *Return on Equity* atau Imbalan Ekuitas

Imbalan atas ekuitas adalah rasio yang menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba dari pemanfaatan modal yang dimiliki. Rasio ini dilakukan dengan membandingkan keuntungan atau kerugian sebelum pos keuntungan atau kerugian. Ini tidak termasuk pendapatan investasi dari APBN dan biaya penyusutan, tetapi ekuitas dikurangi dari surplus atau defisit tersebut. Menurut Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016 rumus menghitung *current ratio* adalah sebagai berikut :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Surplus atau Defisit sebelum pos keuntungan atau kerugian}}{\text{Ekuitas - Surplus atau Defisit sebelum pos keuntungan atau kerugian}} \times 100\%$$

## 7. *Inventory turnover* atau Perputaran Persediaan

Untuk mengukur seberapa efektif persediaan digunakan dalam perolehan pendapatan, perbandingan antara pendapatan usaha dan jumlah persediaan secara keseluruhan disebut perputaran persediaan. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak persediaan yang diputar oleh perusahaan atau entitas dalam satu tahun. Perputaran inventaris tinggi menunjukkan arus keluar produk entitas cukup cepat, sedangkan perputaran inventaris rendah menunjukkan jumlah produk yang masih tertahan di gudang. Menurut Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016 rumus menghitung *current ratio* adalah sebagai berikut :

$$\text{PP} = \frac{\text{Total Persediaan} \times 365}{\text{Pendapatan BLU}} \times 1 \text{ hari}$$

## 8. Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional

Rasio PNBPN terhadap Biaya Operasional adalah rasio yang dipakai guna mengukur tingkat penggunaan pendapatan yang berasal dari bukan pajak dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan yang berasal dari berbagai sumber, seperti yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, pemanfaatan sumber daya alam, hasil-hasil kekayaan negara yang dipisahkan, pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, pengenaan denda administrasi yang berdasarkan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

putusan pengadilan, hibah, dan sumber lainnya yang diatur dalam Undang-Undang. Menurut Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016 rumus menghitung *current ratio* adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pendapatan PNBPN}}{\text{Biaya Operasional}} \times 100\%$$

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016, setiap rasio dinilai dengan skor yang diberikan oleh pemerintah untuk mengevaluasi kemampuan kinerja keuangan perusahaan untuk memenuhi syarat sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Skor-skor tersebut adalah antara lain:

1. *Cash Ratio* atau Rasio Kas

Rasio Kas (%) (RL)	Skor
RK > 480	0,25
420 < RK ≤ 480	0,5
360 < RK ≤ 420	1
300 < RK ≤ 360	1,5
240 < RK ≤ 300	2
180 < RK ≤ 240	1,5
120 < RK ≤ 180	1
60 < RK ≤ 120	0,5
0 < RK ≤ 60	0,25
RK = 0	0

Tabel 1 Skor Rasio Kas

2. *Current Ratio* atau Rasio Lancar

Rasio Lancar (%) (RL)	Skor
RL > 600	2,5
480 < RL ≤ 600	2
360 < RL ≤ 480	1,5
240 < RL ≤ 360	1
120 < RL ≤ 240	0,5
0 < RL ≤ 120	0,25
RL = 0	0

Tabel 2 Skor Rasio Lancar

3. *Collection Period* atau Periode Penagihan Piutang

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<b>Periode Penagihan Piutang (hari)</b>	<b>Skor</b>
<b>(PPP)</b>	
PPP < 30	2
30 ≤ PPP < 40	1,5
40 ≤ PPP < 60	1
60 ≤ PPP < 80	0,5
80 ≤ PPP < 100	0,25
PPP ≥ 100	0

Tabel 3 Skor Periode Penagihan Piutang

4. *Fixed Asset Turnover* atau Perputaran Aset Tetap

<b>Perputaran Aset Tetap (%)</b>	<b>Skor</b>
<b>(PAT)</b>	
PAT > 20	2
15 < PAT ≤ 20	1,5
10 < PAT ≤ 15	1,5
5 < PAT ≤ 10	0,5
0 < PAT ≤ 5	0,25
PAT = 0	0

Tabel 4 Skor Perputaran Aset Tetap

5. *Return on Fixed Asset* atau Imbalan atas Aset Tetap

<b>Return on Fixed Asset (%)</b>	<b>Skor</b>
<b>(ROFA)</b>	
ROFA > 6	2
5 < ROFA ≤ 6	1,7
4 < ROFA ≤ 5	1,4
3 < ROFA ≤ 4	1,1
2 < ROFA ≤ 3	0,8
1 < ROFA ≤ 2	0,5
0 ≤ ROFA ≤ 1	0

Tabel 5 skor Imbalan Atas Aset Tetap

6. *Return on Equity* atau Imbalan Ekuitas

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<b>Return on Equity (%) (ROE)</b>	<b>Skor</b>
ROE > 8	2
7 < ROE ≤ 8	1,8
6 < ROE ≤ 7	1,6
5 < ROE ≤ 6	1,4
4 < ROE ≤ 5	1,2
3 < ROE ≤ 4	1
2 < ROE ≤ 3	0,8
1 < ROE ≤ 2	0,6
0 < ROE ≤ 1	0,4
ROE = 0	0

Tabel 6 skor Imbalan Ekuitas

7. *Inventory turnover* atau Perputaran Persediaan

<b>Perputaran Persediaan (hari) (PP)</b>	<b>Skor</b>
PP > 60	0
55 < PP ≤ 60	0,5
45 < PP ≤ 55	1
35 < PP ≤ 45	1,5
30 < PP ≤ 35	2
25 < PP ≤ 35	1,5
15 < PP ≤ 25	1
5 < PP ≤ 15	0,5
0 ≤ PP ≤ 5	0

Tabel 7 skor Perputaran Persediaan

8. Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional

<b>Rasio PNBPN terhadap Biaya Operasional (%) (PB)</b>	<b>Skor</b>
PB > 65	2,5
57 < PB ≤ 65	2,25
50 < PB ≤ 57	2
42 < PB ≤ 50	1,75
35 < PB ≤ 42	1,5
28 < PB ≤ 35	1,25
20 < PB ≤ 28	1
12 < PB ≤ 20	0,75
4 < PB ≤ 12	0,5
0 ≤ PB ≤ 4	0

Tabel 8 Skor Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Winda Ayu Tyas (2019), meneliti tentang kinerja Badan Layanan Umum Daerah di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kutoarjo, dari Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016, 2016 perlu dilakukan sebuah modifikasi terhadap pengelompokan kriteria diatas. Modifikasi tersebut dilakukan karena berkaitan dengan penelitian ini, peneliti hanya menggunakan rasio keuangan tanpa menilai kepatuhan pengelolaan keuangan BLU ditentukan berdasarkan Total Skor (TS) yang diperoleh, hasil penelitian kinerja keuangan tersebut dikelompokkan dalam kriteria BAIK, SEDANG, dan, BURUK.

1. Kriteria BAIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas.
  - a. AAA, apabila  $TS > 18,5$ ,
  - b. AA, apabila  $15,2 < TS \leq 18,05$ , dan
  - c. A, apabila  $12,92 < TS \leq 15,2$ .
2. Kriteria SEDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. BBB, apabila  $10,64 < TS \leq 12,92$ ,
  - b. BB, apabila  $8,55 < TS \leq 10,64$ , dan
  - c. B, apabila  $6,65 < TS \leq 8,55$ .
3. Kriteria BURUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. CC, apabila  $2,85 \leq TS \leq 6,65$ , dan
  - b. C, apabila TS pada hasil penilaian aspek keuangan yang dicapai oleh BLU kurang dari 50% (lima puluh persen).

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Menurut Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi (2007), penelitian studi kasus adalah penelitian yang mendalam dan menyeluruh tentang masalah tertentu. Menurut Winarno Surakhmad (1982), studi kasus memfokuskan pada satu kasus yang dipelajari secara menyeluruh dan mendalam. Subjek yang diteliti terdiri dari satu unit atau kelompok unit yang dianggap sebagai kasus. Karena perbedaan data antara lokasi, penelitian studi kasus tidak dapat digeneralisasikan.

Penelitian ini dilakukan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada bulan April sampai Juni 2023

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Menurut , data primer berasal dari sumber yang langsung memberikan data kepada peneliti. Sumber ini biasanya adalah tempat objek penelitian dilakukan, dan peneliti menggunakan temuan dari wawancara dengan informan tentang subjek penelitian sebagai sumber data primer. Peneliti mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara dengan narasumber dari RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro. Lalu menurut , data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul datanya, misal melalui orang lain atau melalui dokumen. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder yaitu laporan keuangan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro tahun 2019 hingga 2022. Laporan keuangan tahun 2019 hingga 2022 dipilih peneliti karena selain termasuk laporan keuangan terbaru, pada tahun itu terjadi transisi dari masa pandemi Covid-19, sehingga dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam memproyeksikan bagaimana kinerja perusahaan pada masa pandemi yang bisa membantu untuk memperbaiki kinerja pada masa depan.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Jenis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan data yang bentuknya berupa angka-angka sebagai hasil pengukurannya.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. *Cash Ratio* atau Rasio Kas

Pada tahun 2019 ke 2020 terjadi penurunan sebesar 48%, yaitu dari 970% menjadi 922% yang mana hal ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah kas dan setara kas yang tersedia pada tahun tersebut yang berdasarkan laporan keuangan hal ini terjadi karena pada tahun 2020 beban operasional meningkat. Lalu pada tahun 2021 kinerja keuangan dari rasio kas meningkat secara drastis hingga mencapai angka 2016%, yang mana hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah kas dan setara kas perusahaan karena terjadi peningkatan pendapatan operasional dari pendapatan atas jasa layanan masyarakat karena pada tahun 2021 pasien Covid-19 sedang naik-naiknya. Lalu pada tahun 2022 terjadi penurunan lagi yang cukup drastis hingga menjadi 674%, yang mana berdasarkan laporan keuangan, hal ini terjadi disebabkan karena terjadi berkurangnya kas dan setara kas yang tersedia karena pendapatan operasional juga menurun karena pada tahun 2022 pasien Covid-19 sudah cukup berkurang sehingga pendapatan atas jasa layanan masyarakat juga menurun, lalu diikuti dengan utang lancar yang masih cukup besar, tapi hal ini bukan berarti bahwa perusahaan tidak mampu menyeimbangkan pengelolaan kas dan setara kas milik BLU dengan kewajiban jangka pendeknya.

### 2. *Current Ratio* atau Rasio Lancar

pada tahun 2019 ke 2020 perusahaan mampu meningkatkan kinerja rasio lancar secara drastis sebesar 6.757%, dari angka 4.628% menjadi 11.385% yang mana berdasarkan laporan keuangan, kenaikan ini disebabkan karena perusahaan memiliki saldo tambahan pada investasi jangka pendek yang cukup banyak serta kenaikan angka pada pendapatan yang masih harus diterima oleh perusahaan, dan diikuti dengan adanya penurunan jumlah kewajiban jangka pendek dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2021, perusahaan mengalami penurunan yang drastis menjadi 4.564% yang mana hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut perusahaan tidak memiliki saldo pada pos belanja dibayar dimuka serta terjadi kenaikan jumlah kewajiban lancar yang cukup besar, tapi hal ini bukan berarti bahwa perusahaan tidak mampu menyeimbangkan antara aset tetap dengan kewajiban jangka panjangnya. Lalu pada tahun 2022, terjadi kenaikan lagi menjadi 5.313%, yang mana hal ini disebabkan karena adanya peningkatan aset tetap berupa investasi jangka pendek perusahaan yang cukup besar dan peningkatan pendapatan yang masih harus diterima oleh perusahaan.

### 3. *Collection Period* atau Periode Penagihan Piutang

pada tahun 2019 ke 2020 terjadi penurunan dari yang awalnya periode penagihan piutang terjadi selama 135 hari menjadi 83 hari yang disebabkan karena terjadinya penurunan angka piutang usaha yang mana artinya kinerja perusahaan dalam menagih utang adalah baik. lalu pada tahun 2021 terjadi kenaikan lagi secara drastis menjadi 172 hari, hal ini disebabkan karena terjadi lonjakan angka pada piutang usaha diikuti

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dengan berkurangnya pendapatan usaha, berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan bidang keuangan, hal ini disebabkan karena pada tahun ini terjadi lonjakan pasien Covid-19 yang aman menyebabkan banyak pelayanan jasa yang belum terbayarkan. Lalu pada tahun 2022 periode penagihan piutang turun lagi secara drastis menjadi 16% dikarenakan adanya peningkatan pendapatan usaha dibarengi dengan penurunan angka pada piutang usaha, hal ini dikarenakan piutang yang lalu sudah terbayarkan pada tahun 2022 ini.

4. *Fixed Asset Turnover* atau Perputaran Aset Tetap

pada tahun 2019 ke 2020 terjadi penurunan sedikit yang hanya 1% dari 44% ke 43% yang mana hal ini disebabkan karena ada penambahan aset tetap perusahaan berupa peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan, namun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan. Lalu pada tahun 2021, terjadi peningkatan menjadi 59% karena adanya kenaikan pendapatan operasional yang cukup besar diikuti dengan bertambahnya aset tetap perusahaan berupa mesin, gedung, dan konstruksi dalam pengerjaan. Namun pada tahun 2022 angka rasio mengalami penurunan lagi menjadi 37% yang mana hal ini disebabkan karena terjadi penambahan aset tetap berupa gedung dan mesin, namun pendapatan operasional pada tahun ini sangat menurun, hal ini disebabkan karena peralihan dari masa Covid-19 ke masa New-Normal yang mana pendapatan dari layanan jasa rawat jalan maupun rawat inap makin menurun seiring dengan hilangnya pandemi.

5. *Return on Fixed Asset* atau Imbalan atas Aset Tetap

pada tahun 2019 ke 2020 terjadi kenaikan angka dari -8% menjadi -5%, pada tahun 2019 dan 2020 perusahaan mengalami kerugian karena beban operasional perusahaan lebih besar daripada pendapatan, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan angka rasio karena adanya pengurangan pada beban perjalanan dinas karena pada tahun 2020 sudah mulai diberlakukan sistem Work From Home sehingga perusahaan mengurangi anggaran untuk perjalanan dinas dan mengganti berbagai pertemuan secara daring. Lalu pada tahun 2021 terjadi kenaikan angka rasio yang cukup signifikan hingga mencapai angka 10%, hal ini disebabkan karena pada tahun ini perusahaan mengalami surplus/keuntungan yang cukup besar, hal ini dikarenakan adanya tambahan pendapatan operasional dari hibah untuk menunjang penanganan Covid-19 dan pendapatan dari entitas lain. Namun, pada tahun 2022 mengalami penurunan lagi menjadi -11% yang mana diakibatkan karena perusahaan mengalami defisit/kerugian lagi yang disebabkan oleh berkurangnya pendapatan perusahaan berupa hibah karena pada tahun ini Indonesia sudah mulai menerapkan New Normal dan pasien Covid-19 sudah berkurang karena telah terlaksananya vaksin sehingga dana hibah yang diberikan oleh perorangan, lembaga, maupun pemda juga berkurang.

6. *Return on Equity* atau Imbalan Ekuitas

tahun 2019 ke 2020 terjadi kenaikan angka rasio dari sebesar -6% ke -4%, namun pada tahun 2019 dan 2020 angka rasio sama-sama menunjukkan angka minus yang artinya kinerja kurang baik, hal ini disebabkan karena pada tahun itu perusahaan mengalami defisit/kerugian berturut-turut. Namun kenaikan persentase sebesar 2% itu disebabkan karena adanya peningkatan ekuitas yang cukup besar diikuti dengan berkurangnya jumlah kerugian perusahaan. Lalu pada tahun 2021 mengalami

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kenaikan lagi menjadi 8% yang mana diakibatkan karena pada tahun tersebut perusahaan mengalami surplus/keuntungan dari pendapatan hibah. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan lagi hingga ke angka -8% karena perusahaan mengalami kerugian lagi yang besar jumlahnya serta diikuti dengan bertambahnya jumlah ekuitas.

## 7. *Inventory turnover* atau Perputaran Persediaan

pada tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan dari yang awalnya perusahaan mampu menjual persediaanya dalam 27 hari naik menjadi 50 hari, hal ini diakibatkan karena total persediaan meningkat diikuti dengan menurunnya pendapatan BLU pada tahun tersebut. Lalu pada tahun 2021, terjadi penurunan menjadi 33 hari, berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan bidang keuangan, hal ini disebabkan karena total persediaan pada tahun tersebut menurun cukup banyak, pada tahun ini angka Covid-19 sedang naik-naiknya sehingga penjualan obat pasti akan meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Pada tahun 2022 terjadi penurunan lagi menjadi 29 hari, hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan pendapatan BLU dan jumlah persediaan pada tahun itu juga tidak terlalu banyak.

## 8. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional

pada tahun 2019 ke 2020 terjadi kenaikan sebesar 6% dari 84% menjadi 90%, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan PNBP. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan lagi hingga ke angka 120% karena adanya kenaikan pendapatan PNBP berupa hibah pada masa pandemi Covid-19. Lalu tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 76%, yang mana hal ini disebabkan karena terjadi penurunan pendapatan karena hibah yang berkurang serta biaya operasional perusahaan juga meningkat.

### Penilaian

INDIKATOR	TAHUN							
	2019		2020		2021		2022	
	Rasio Kinerja Keuangan	Skor	Rasio Kinerja Keuangan	Skor	Rasio Kinerja Keuangan	Skor	Rasio Kinerja Keuangan	Skor
RK	970%	0.25	922%	0.25	2016%	0.25	674%	0.25
RL	4628%	2.5	11385%	2.5	4564%	2.5	5313%	2.5
PPP	135 hari	0	83 hari	0.25	172 hari	0	16 hari	2
PAT	44%	2	43%	2	59%	2	37%	2
ROFA	-8%	0	-5%	0	10%	2	-11%	0
ROE	-6%	0	-4%	0	8%	1.8	-8%	0
PP	27	1.5	50	2	33	2	29	1.5
PB	84%	2.5	90%	2.5	120%	2.5	76%	2.5
Total Skor (TS)		8.75		9.5		13.05		10.75

Tahun	Total Skor	Kriteria	Predikat
2019	8.75	Baik	BB
2010	9.5	Sedang	BB
2021	13.05	Sedang	A
2022	10.75	Sedang	BBB

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Hasil Uji Mann Whitney

Uji Mann Whitney merupakan pengujian nonparametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang berpasangan dengan cara melihat perbedaan kedua kelompok yang dibandingkan. Uji Mann Whitney merupakan uji non parametrik untuk data yang tidak berdistribusi secara normal

### Test Statistics<sup>a</sup>

	Kinerja
	Keuangan
Mann-Whitney U	.000
Wilcoxon W	3.000
Z	-1.549
Asymp. Sig. (2-tailed)	.121
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.333 <sup>b</sup>

a. Grouping Variable: Periode

b. Not corrected for ties.

Berdasarkan hasil uji beda diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai signifikansi perbandingan skor sebelum masa pandemi dan sesudah masa pandemi adalah  $0,121 > 0,05$ , sehingga hal ini dapat menjelaskan bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan rumah sakit.

## Kesimpulan

Menurut hasil analisis yang telah dilakukan dan hasil interpretasinya skor berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro periode tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis rasio yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa perusahaan memiliki kualitas kinerja keuangan yang sedang. Menurut hasil perhitungan analisis rasio kas dan rasio lancar, dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan sudah mampu mengelola aset lancarnya terutama pada kas dan setara kas milik BLU untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya sehingga perusahaan memiliki likuiditas yang baik. lalu dari perhitungan analisis rasio periode penagihan piutang, perusahaan belum memiliki kinerja yang baik, karena perusahaan memerlukan waktu yang cukup lama dalam mengubah piutang menjadi kas atau menagih piutang yang mana hal ini kemungkinan akan menyebabkan perusahaan memiliki piutang tidak tertagih. Berdasarkan perhitungan analisis rasio perputaran aset tetap, perusahaan sudah mampu mengelola aset tetap dengan baik untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dengan aset tetap paling banyak ada di peralatan dan mesin medis. Lalu berdasarkan perhitungan analisis imbalan atas aset tetap dan imbalan atas ekuitas, perusahaan belum mampu mengelola aset tetap dan ekuitas berupa modal untuk memaksimalkan laba, karena pada periode tersebut perusahaan banyak mengalami kerugian, perlu dikaji ulang penyebab kerugian tersebut dan diperlukan perbaikan.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Untuk rasio perputaran persediaan, perusahaan cukup memiliki kinerja yang baik dalam membeli, menjual, dan mengganti persediaan barangnya, tidak memerlukan waktu yang lama sehingga hal ini akan mengurangi kemungkinan kerusakan persediaan. Terakhir dari rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional, perusahaan sudah mampu mengelola pendapatan PNBPN untuk memenuhi biaya operasional perusahaan dengan baik.

2. berdasarkan hasil uji beda non parametrik menggunakan uji Mann Whitney, pandemi Covid-19 ini tidak berdampak secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, namun ada beberapa aspek yang terdampak, dampak yang paling terasa adalah pada tahun 2021, perusahaan memperoleh tambahan pendapatan dari dana hibah untuk menunjang pelayanan penanganan Covid-19 namun selain itu, beban operasional juga bertambah seiring bertambahnya jumlah pasien rawat jalan maupun rawat inap.

3. Pada tahun 2019 perusahaan mendapatkan skor sebesar 8,75 sehingga dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan dengan kinerja sedang berpredikat BB, pada tahun 2020 perusahaan mendapatkan skor sebesar 9,5 sehingga dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan dengan kinerja sedang berpredikat BB, pada tahun 2021 perusahaan mendapatkan skor sebesar 13,05 sehingga dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan dengan kinerja baik berpredikat A, dan pada tahun 2022 perusahaan mendapatkan skor sebesar 10,75 sehingga dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan dengan kinerja sedang berpredikat BBB. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 dan melihat skor yang diperoleh RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan masih bisa mempertahankan status Badan Layanan Umum pada masa depan.

## Daftar Pustaka

Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi. (2007). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara.

Dr. Francis Hutabarat, MBA. , C. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*. Desanta Publisher.

Fahmi Irham. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta.

<https://rsupsoeradji.id/>. (n.d.).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (1973). *Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)*.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2015). *PSAK 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan*.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan: Vol. Duabelas (Pertama)*. PT Raja Grafino Persada.
- Kementrian Keuangan. (n.d.). *PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum*.
- Laporan Keuangan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten*. (2019).
- Laporan Keuangan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten*. (2020).
- Laporan Keuangan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten*. (2021).
- Laporan Keuangan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten*. (2022).
- Munawir S. (2010). *Analisis Laporan Keuangan: Vol. lima belas (empat)*. Liberty.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016*. (n.d.).
- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016*. (2016).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum*. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum*. (2005).
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyajian Laporan Keuangan*. (n.d.).
- Portofolio Rencana Kerja Tahunan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun 2020*. (2020a).
- Portofolio Rencana Kerja Tahunan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun 2020*. (2020b).
- Winarno Surakhmad. (1982). *Pengantar Interaksi Belajar Mengajar, Dasar dan Teknik Metodologi Pengajaran*. Tarsito.
- Winda Ayu Tyas Saraswati Harja. (2019). *Analisis Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (Studi Kasus di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kutoarjo)*.